

35 Warga Purworejo Terkonfirmasi Covid-19

PURWOREJO (KR) - Warga terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Purworejo kembali bertambah 35 orang dalam tiga hari terakhir, 11 diantaranya tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di sejumlah fasilitas medis. Satu pasien pria berusia 69 tahun warga Kecamatan Purworejo, meninggal dunia dalam perawatan tim medis RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo. "Hari Kamis (20/8) kami mendapat laporan 10 warga terkonfirmasi Covid-19 berdasar hasil uji swab, Jumat (21/8), ada 25 yang dinyatakan positif. Untuk Sabtu (22/8), tidak ada laporan hasil swab yang masuk ke satgas," tutur Jubir Satgas Covid-19 Purworejo, dr Tolcha Amaruddin Sp THT, Minggu (23/8). Puluhan pasien berasal dari Kecamatan Loano (9), Purworejo (9), Gebang (7), Kutoarjo (4), Bener (2), Bayan (2), Bruno (1), dan Kemiri (1). Total pasien terkonfirmasi Covid sejak kasus pertama muncul di Purworejo, tercatat sebanyak 337 jiwa.

Sementara jumlah pasien terkonfirmasi yang meninggal bertambah 1 menjadi delapan orang. 256 dinyatakan selesai menjalani isolasi. Menurutny, lonjakan kasus baru membuktikan penularan setempat masih terjadi di Purworejo. Sumber penularan semakin sulit dilacak karena tingginya mobilitas masyarakat dan abainya sebagian warga dalam penerapan protokol kesehatan. Terkait sebelas nakes terkonfirmasi, mereka diduga tertular dari pasien yang menjalani perawatan. "Para pasien ini tidak menunjukkan gejala khas, baru ketahuan Covid-19 setelah dirawat inap beberapa hari. Akhirnya nakes yang kontak erat ikut diswab dan hasilnya sebagian sudah keluar," terangnya. (Jas)

Target Pendapatan PBB Turun 50 Persen

TEMANGGUNG (KR) - Capaian pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Temanggung sampai akhir Juli 2020 baru mencapai kisaran Rp 1,2 miliar dari target Rp 10 miliar. Target itu didapat dari 609.919 objek pajak. "Kami tetap optimis target tercapai meski sampai saat ini capaian baru sedikit," kata Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Temanggung Tri Winarno, Jumat (21/8). Dikatakan, menjadi kebiasaan masyarakat membayar PBB menjelang akhir jatuh tempo, yakni 30 September. Namun khusus tahun ini, pembayaran PBB sampai akhir Desember 2020 dan tidak dikenakan denda. Pembayaran PBB sebenarnya sampai 30 September dengan denda keterlambatan sebesar dua persen per bulan, tetapi tahun ini tidak ada denda sampai pembayaran bulan Desember 2020 dan diharapkan kami pada 30 September 2020 bisa bayar semua.

Tri Winarno mengatakan target PBB tahun 2020 sebenarnya Rp 20 miliar, tetapi begitu ada pandemi Covid-19 Pemkab Temanggung memberikan keringanan pembayaran PBB 50 persen, maka dilakukan perubahan target menjadi Rp 10 miliar. Menurutny, pembayaran PBB pada tahun-tahun sebelumnya selalu terpenuhi 100 persen. Target tahun 2019 sebesar Rp 13 miliar juga terpenuhi. (osy)

Webinar Pengelolaan PTM Berbasis Wakaf

SEMARANG (KR) - Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (MWK PWM) Jateng bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) menggelar seminar online (webinar) 'Pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Berbasis Wakaf' melalui zoom di kampus Unimus, Sabtu (22/8). Webinar dibuka Ketua PWM Jateng Drs H Tafsir Mag menandatangani pembicara kunci Rektor Unimus Prof Dr H Masrukhi MPd dan 3 pembicara Prof Hilman Latief MA PhD (Ketua Lazismu Pusat dan Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), H Hendri Tanjung PhD (koordinasi Pembinaan Nadzir Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat dan Wakil Direktur PascaSarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor), dan Prof Dr Raditya Sukmana MA (Guru Besar Bidang Wakaf dan Ketua Departemen Ekonomi Syariah FEB Unair) serta Moderator Dr H A Furqon LC MA (Sekretaris MWK PWM Jateng) dan ditutup Ketua MWK PWM Jateng H Widadi SH.

Ketua PWM Jateng Tafsir Mag dan Rektor Unimus Prof Dr Masrukhi MPd menyampaikan selama ini kalau bicara wakaf lebih banyak membahas tentang potensi besarnya zakat, wakaf, infak sodakoh umat Muslim termasuk warga Muhammadiyah. Sehingga perlu lebih fokus pada aktualisasi dan apa yang dilakukan dengan potensi besar tersebut. (Sgi)



KR-Sugeng Irianto

Rektor Unimus (kanan) dan Ketua PWM Jateng (2 dari kanan) saat berbicara di seminar.

Balon Pilkada Diantar Pimpinan Parpol

SEMARANG (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang menerapkan protokol kesehatan pada pendaftaran bakal calon (balon) peserta Pilkada Kabupaten Semarang 2020. Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi, Minggu (23/8) mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun protap pendaftaran bakal calon dan dipastikan peserta Pilkada hanya boleh diantar oleh pimpinan partai politik pengusung. Sedangkan jumlahnya menyesuaikan dengan kapasitas ruangan tempat pendaftaran dan menerapkan protokol kesehatan.

"Kami akan membatasi jumlah pengantar bakal calon saat mendaftarkan diri. Bakal calon diantar pimpinan parpol pada saat pendaftaran pada 4-6 September nanti," jelas Maskup Asyadi. Meski demikian untuk protap bersama, KPU Kabupaten Semarang menggelar rapat kerja dengan beberapa KPU di zona III Jateng yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Kegiatan ini dilaksanakan pada 26-27 Agustus di Ungaran, Kabupaten Semarang, dihadiri KPU Jateng. (Sus)

Akan Dilelang, Batang Bambu Mirip Lafadz Allah

KLATEN (KR) - Batang pohon bambu milik Ponimin warga Dukuh Platen RT 02/RW 01 Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten menjadi tontonan warga karena keunikannya.

Batang pohon bambu ini menyerupai lafadz Allah. Ponimin menceritakan, batang pohon bambu mirip lafadz Allah itu ia temukan sekitar tiga tahun silam di area Sendang Ledek yang berjarak satu kilometer dari rumahnya. Sebelum menemukan bambu unik tersebut ia mengaku sempat bermimpi.

"Saya melaksanakan salat tahajud selama tiga tahun berturut-turut. Kemudian bermimpi bertemu dengan sosok kakek-kakek berjubah serba putih. Kemudian waktu ke Sendang Ledek saya mendapatkan bambu ini. Bambu jenis ampel," ujarnya, Sabtu (22/8).

Dijelaskan, pada saat pertama kali ditemukan, bambu tersebut dalam posisi tergeletak di tepian Sendang Ledek. Ketika itu hanya dirinya yang bisa melihat bambu tersebut. Kemudian bambu itu ia bawa pulang dan dirawat sampai saat ini.

"Selama tiga tahun bambu ini saya taruh di ruang tamu. Sejak ada bambu ini saya merasa lebih *ayem tentrem*. Terhadap keluarga dan anak-anak semakin sayang. Kalau dulu sebelum dapat bambu saya tergolong galak di rumah," ujarnya.



Ponimin menunjukkan batang bambu unik miliknya.

KR-Indratno Eprilianto

Bawaslu Temukan Rumah Warga Belum Dicoklit

PURWOREJO (KR) - Kendati tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) tahun 2020 sudah berakhir pertengahan bulan ini, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo masih menemukan puluhan rumah warga yang belum dicoklit.

"Temuan tersebut didapat dari kegiatan audit yg dilakukan serempak seluruh pengawas se-Purworejo," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Purworejo Anik Ratnawati SPd, Sabtu (22/8).

Dijelaskan, dari hasil penelusuran itu ditemukan sedikitnya ada 34 rumah warga yang belum didatangi petugas coklit. "Ada 17 rumah yang dikunjungi Pengawas Kelurahan Desa (PKD) dan

rumah sudah dicoklit tapi saat ditanya apakah petugas coklit memakai Alat Pelindung Diri (APD), pemilik rumah mengatakan bahwa petugas saat mencoklit tidak menggunakan APD. Padahal dalam aturannya bahwa semua petugas coklit harus menggunakan APD yang diberikan KPU," jelasnya.

Dijelaskan pula, dari beberapa pemilik rumah yang diambil untuk sampling audit terdapat perubahan elemen data pemilih. Bawaslu meminta perubahan ele-

men data tersebut sudah diperbaiki agar tidak salah saat ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Ada pula rumah yang tidak dipasang stiker sebagai bukti telah dicoklit.

"Ada berbagai alasan seperti sudah dipasang tapi lepas, PPDP hanya menitipkan kepada tetangga. Stiker tidak dipasang karena tuan rumah tidak berkenan bahkan karena tidak ditempel oleh PPDP akhirnya stiker hanya dibiarkan tergeletak," jelas Anik Ratnawati. (Nar)

Golkar Merapat ke PDIP di Pilkada Klaten

KLATEN (KR) - Peta politik kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Klaten semakin dinamis menjelang pendaftaran calon kandidat. Rumor paling santer yakni pergantian pasangan yang diusung PDIP yang semula Sri Mulyani - Aris Prabowo (SIAP) menjadi Sri Mulyani-Yoga Hardaya (MULYO).

Sri Mulyani merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Klaten dan Aris Prabowo merupakan kader PDIP yang semula mendapatkan rekomendasi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dari DPP PDIP.

Namun belakangan beredar rumor posisi Aris Prabowo tergusur oleh Yoga Hardaya yang merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Klaten.

Menanggapi rumor pergantian pasangan tersebut, Sri Mulyani mengatakan, sebagai petugas partai tentunya harus siap menjalankan perintah partai. Meskipun MULYO ya harus solid demi rakyat. Karena ini adalah sebuah pasangan yang harus meninggalkan egonya masing-masing dan yang diutamakan

adalah kepentingan rakyat," ujarnya, Sabtu (22/8).

Koalisi besar PDIP dengan Partai Golkar diyakini Sri Mulyani bakal mendongkrak dukungan suara. Ia optimis unggul dengan target 80%. Sejauh ini pihaknya masih membuka lebar-lebar bagi partai politik (parpol) lain yang ingin bergabung dalam koalisi.

"Dinamika politik bisa-bisa saja (parpol) lain bergabung dalam koalisi) selagi belum mendaftarkan ke KPU. Semua bisa dimungkinkan berubah karena politik itu keberamaan. Harapan saya Klaten selalu mulyo," ujarnya.

Terpisah, menanggapi rumor pergantian pasangan petahana dari SIAP menjadi MULYO, PKB Kabupaten Klaten melihat hal tersebut sebagai langkah strategi politik. PKB yang saat ini mengusung pasangan Arif Budiyo - Harjanta (ABY-HJT) tak gentar jika rumor pergantian pasangan kubu lawan tersebut benar terjadi.

"Saya punya jago hebat, barangkali itu (pergantian pasangan SIAP ke MULYO) kepanikan dengan jago kita. Figur ABY cerdas dan pandai. Selain itu ketokohan HJT yang memiliki pengaruh besar. Apalagi animo masyarakat yang menginginkan perubahan kepemimpinan di Klaten sangat tinggi," imbuhnya. (Lia)

Produksi Padi Jateng Tertinggi Nasional

SEMARANG (KR) - Jawa Tengah (Jateng) ditetapkan sebagai provinsi dengan produksi padi terbanyak secara nasional. Dengan ketetapan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan penghargaan kepada Jateng sebagai daerah dengan tingkat produksi beras tertinggi se-Indonesia tahun 2019.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distansu) Provinsi Jateng Suryo Banendro, kepada wartawan di ruang kerjanya, akhir pekan lalu. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tepat pada HUT ke-75 Kemerdekaan RI Indonesia, Senin (17/8).

Tahun lalu (2019), Jateng berhasil memproduksi padi sebanyak 9.655.654 ton gabah kering giling (GKG), atau setara dengan 5.523.969 ton beras. Adapun luas tanam pada tahun tersebut seluas 1.692.546 hektare dan luas lahan panen 1.678.479 hektare.

Menurut Ganjar Pranowo, produksi padi Jateng mengalahkan Provinsi Jatim yang justru mempunyai luas lahan panen lebih luas, yakni 1.702.426 hektare. Dengan luasan tersebut, provinsi

itu menghasilkan 9.580.933,88 ton GKG atau setara 5.496.581 ton beras. Tempat ketiga adalah Provinsi Jabar dengan luas panen 1.578.835 hektare dan menghasilkan padi 9.084.957 ton GKG atau setara 5.212.039 ton beras.

Selain Jateng yang memperoleh penghargaan, tiga kabupaten di Jateng juga memperoleh predikat produsen padi tertinggi, yaitu Grobogan dengan 772.551 ton GKG di tempat 8, Kabupaten Sragen dengan 766.012 GKG di tempat 9 dan Cilacap dengan 699.965 GKG di tempat 10.

Suryo Banendro mengatakan, selain usaha keras dari para petani, jalinan kerjasama antar sektor juga memengaruhi kenaikan produktivitas lahan padi di Jateng.

"Sektor pertanian kalau bekerja juga dipengaruhi oleh orang luar, bibit dari swasta, saluran irigasi dari PSDA, pupuk dari BUMN. Ini hasil kerja sama di bawah arahan Ganjar," tutur Suryo.

Suryo mengatakan, untuk menggenjot produksi padi, pihaknya memberikan berbagai bantuan dan program. Di antaranya, melakukan pembasmian hama wereng dan tikus, percepatan tanam dan pemberian bantuan pompa air. (Bdi)

Pekerja di Purworejo Selamat dari PHK

PURWOREJO (KR) - Selama pandemi Covid-19, para pekerja di Kabupaten Purworejo masih selamat dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun sebagian ada yang dirumahkan karena kondisi perusahaan yang tidak bisa beroperasi secara maksimal.

"Dirumahkan tapi tidak diberhentikan. Ketika perusahaan beroperasi pekerja ditarik kembali," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Purworejo Gathot Suprpto SH, Sabtu (22/8).

Di sela-sela kegiatan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial naker pada masa new habit di Hotel Ganesha, Gathot Suprpto mengakui selama pandemi Co-

vid-19 sektor tenaga kerja di Purworejo sangat terpuruk. Terlebih perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor. Begitu pun sektor usaha ekspor juga terpuruk karena adanya larangan ekspor seperti kayu dan lainnya.

"Usaha kuliner juga banyak yang tutup hingga beberapa bulan, otomatis pekerjanya dirumahkan," katanya seraya menambahkan, usaha kuliner kini sudah ada yang mulai buka kembali sehingga tenaga kerjanya kembali bekerja.

Pada kesempatan itu juga diserahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada penerima manfaat terkait kematian akibat kecelakaan kerja dan sakit oleh Wakil Bupati (Wabup) Purworejo Hj Yuli Hastuti

SH. Yakni kepada ahli waris Karyanto karyawan PT Indotama Omicron Kahar senilai Rp 119,5 juta dan

ahli waris Aswadi karyawan Hotel Ganesha PDAU senilai Rp 64,8 juta. Masing-masing ahli waris juga menerima jaminan

pensiun sebesar Rp 350.000/bulan. Anak-anak me-reka juga akan mendapat beasiswa sampai selesai kuliah. (Nar)



KR-Gunawan

Wabup Purworejo Hj Yuli Hastuti didampingi Gathot Suprpto menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada penerima manfaat.